



EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMTAS) PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Dewi Pindiharti¹, Muhammad Cholifihani², Agung Edi Rustanto³, Siti Mariam⁴

^{1,2,3,4}Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Esa Unggul

*Corresponding Email: nopi19fr@gmail.com

Riwayat Artikel

Dikirim:

Direvisi:

Diterima:

Abstract

School-aged children are an investment and the nation's next golden generation. Providing daily food to children will influence the improvement of nutritional status. Providing Additional Food for School Children (PMTAS) is an activity of providing food to students in the form of snacks or complete meals along with other supporting activities. The aim of this research is to evaluate the implementation of the policy for Providing Supplementary Meals for School Children (PMTAS) at State Elementary Schools in the Region II Education Sub-Department of West Jakarta Administrative City. This research method uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and observation. Interviews were conducted with 10 (ten) informants consisting of the Head of the Education Sub-Department, School Principal, Chair of the School Committee, Students and Parents of Students. Data analysis was carried out using content analysis techniques to identify themes and patterns that emerged from qualitative data, as well as using Rapid Assessment Procedure (RPA) analysis. The findings from this research show that the planning and implementation of activities have been carried out well in accordance with existing regulations although there are still obstacles in determining funding, target schools and the number of recipient students. Supervision and reporting have been carried out well, but in its implementation evaluation needs to be carried out to determine the success of the program and assistance is needed in making activity reports.

Abstrak

Anak usia sekolah merupakan investasi dan generasi emas penerus bangsa. Pemberian makanan sehari-hari pada anak akan mempengaruhi peningkatan status gizi. Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) merupakan kegiatan penyediaan maka kepada peserta didik dalam bentuk kudapan atau makanan lengkap beserta kegiatan pendukung lainnya. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) pada Sekolah Dasar Negeri di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap 10 (sepuluh) informan yang terdiri dari Kepala Suku Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah, Siswa dan Orang Tua Siswa. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dari data kualitatif, serta menggunakan analisis *Rapid Assesment Prosedure* (RPA). Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada meskipun masih ada kendala dalam menentukan dana, sekolah sasaran dan jumlah siswa penerima. Pengawasan dan pelaporan sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan program dan perlu adanya pendampingan dalam membuat laporan kegiatan.

Kata kunci: *Evaluasi Kebijakan; Implementasi Kebijakan; Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah*

1. PENDAHULUAN

Masa usia anak sekolah adalah masa yang paling optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Anak usia Sekolah Dasar adalah investasi bangsa, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Anak usia Sekolah Dasar 6-12 tahun merupakan masa dimana anak memiliki beragam aktivitas dan mudah terpengaruh oleh kebiasaan diluar keluarga, sehingga kebutuhan gizinya harus mendapat perhatian utama (Chandradewi and Adiyasa 2021). Salah satu persoalan kesehatan yang masih perlu perhatian khusus dari pemerintah adalah masalah kurang gizi, terutama bagi anak-anak Sekolah Dasar di daerah dan perkotaan. Masalah kurang gizi sangat merisaukan karena mengancam kualitas sumber daya manusia dimasa mendatang. Kualitas bangsa di masa depan ditentukan oleh kualitas anak-anak saat ini. Upaya peningkatan sumber daya manusia harus dilakukan sejak dini, sistematis dan berkesinambungan. Tumbuh kembangnya anak usia Sekolah Dasar yang optimal tergantung pemberian asupan zat gizi dengan kualitas dan kuantitas yang baik (Suiraoaka dan Sugiani 2017). Dalam mendukung kebutuhan gizi anak sekolah, pemerintah melakukan program untuk anak sekolah. Salah satu upaya yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung mengatasi permasalahan kurang gizi anak sekolah dengan melakukan program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).

Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencatat bahwa jumlah siswa Sekolah Dasar di Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2024-2025 sebanyak 1.639.065 siswa. Jumlah siswa Sekolah Dasar kota Jakarta Barat Tahun Pelajaran 2024-2025 sebanyak 357.080 siswa. Berdasarkan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan prevalensi balita stunting terendah kedua di Indonesia. Kota Jakarta Barat menempati posisi ke dua dengan prevalensi anak kurang gizi 15,2% pada tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2019 Provinsi DKI Jakarta memiliki program PMT-AS yang diselenggarakan di Sekolah Dasar Negeri dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah pada satuan pendidikan mengenai penerima program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah di satuan Pendidikan. Pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di satuan Pendidikan PAUD Negeri dan SLB Negeri dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sedangkan Pelaksanaan PMTAS untuk SDN dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan Kota.

Berdasarkan penelitian Navaneethan (2011) bahwa program Makan Tengah Hari pada dasarnya adalah untuk meningkatkan angka melek huruf di negara bagian tersebut. Awalnya banyak pihak yang mengkritisi program ini, namun kemudian program ini mendapat momentum karena meningkatkan kehadiran anak di sekolah negeri. Makanan yang diberikan untuk Makan Tengah Hari perlu diperiksa secara menyeluruh untuk menjaga kualitas gizinya. Makan Tengah Hari saja tidak dapat meningkatkan kesehatan siswa. Orang tua harus diajarkan tentang gaya hidup sehat. Ada banyak parameter yang saling terkait. Makanan yang disediakan pada saat Makan Siang harus higienis. Total kalori yang dibutuhkan per siswa harus direvisi secara berkala dan harus disesuaikan dengan wilayah tertentu (Navaneethan *et al.* 2011).

Pada penelitian terdahulu oleh Berly Nisa Srimayarti dan Ririn Afrima Yenni (2021) bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PMTAS sudah bisa dikatakan bagus meskipun masih ada sedikit kendala dalam menentukan dana, sekolah sasaran dan jumlah makan anak. Pemberian makanan kudapan sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan cita rasa dari rasa kudapan yang akan diberikan. Makanan yang diberikan juga kurang bervariasi. Pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) dapat meningkatkan status gizi anak. Penyediaan makanan tambahan diperlukan untuk mengatasi kecukupan asupan gizi melalui makanan tambahan, sehingga status gizi dan kesehatan anak dalam keadaan baik. Keadaan kurang gizi pada anak disebabkan oleh rendahnya asupan makanan yang bergizi dapat mengakibatkan terganggunya perkembangan pada anak. Pemberian makanan tambahan pada anak sekolah diharapkan mampu diberikan secara berkala dari pihak sekolah dan Dinas Kesehatan (Rusi *et al.* 2022)

Fenomena ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohima (2016) yang menyorot masalah kurang gizi sangat merisaukan karena mengancam kualitas sumber daya manusia dimasa mendatang. Program PMTAS mempertimbangkan mengenai pencukupan gizi yang merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang perkembangan optimal pada anak. Namun sayangnya, tidak sedikit anak-anak yang masih berada di usia sekolah tidak tercukupi kebutuhan gizinya. Studi keberlanjutan program makanan tambahan untuk anak sekolah di Bandung mengemukakan bahwa proses pelaksanaan program tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring. Pelaksanaan PMT-AS dari pihak sekolah dan masyarakat memberikan persepsi bahwa program tersebut sudah berjalan dengan baik, program PMT-AS memberikan manfaat bagi anak. Manfaat PMT-AS mampu memberikan pengaruh positif pada anak, sekolah dan lingkungan. Ketahanan fisik anak yang lebih baik akan memberikan peluang anak menerima dan melaksanakan pembelajaran lebih baik. Kinerja PMT-AS mencakup input, proses, dan output. Input meliputi dana, tenaga, sarana, prasarana, pelatihan, dan penyuluhan. Proses meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring. Output meliputi status gizi, angka absensi, prestasi akademik, dan pengetahuan gizi. Masyarakat di Bandung memberikan persepsi bahwa pelaksanaan PMTAS berjalan dengan baik (Rohima 2016).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah pada lokus yaitu di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat. Penelitian ini juga melibatkan lebih banyak sekolah di wilayah yang sama. Dengan cara ini, akan ada gambaran yang lebih luas dan representatif serta memungkinkan untuk membuat generalisasi yang lebih kuat. Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan oleh penulis bahwa program PMT-AS di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat sudah dijalankan sesuai aturan yang ada, tetapi masih banyak kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya seperti tidak semua Sekolah Dasar negeri menerima program PMTAS, kurang kreatifnya tim pemasak kudapan dalam memvariasikan menu kudapannya sehingga peserta didik bosan dengan menu yang ada, sebagian sekolah belum optimal memanfaatkan lahan perkarangan sekolah, masih kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pihak puskesmas terkait dalam pelaksanaan program PMT-AS, pendanaan yang masih belum cukup sesuai dengan jumlah sasaran peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian program PMTAS kemudian diambil keputusan apakah program dan kebijakan tersebut akan: (1) diteruskan, (2) direvisi, (3)

dihentikan, atau (4) dirumuskan kembali sehingga dapat ditemukan tujuan, sasaran dan alternatif baru yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya.

Dengan adanya latar belakang penelitian diatas, maka peneliti ingin menjelaskan tentang bagaimana implementasi kebijakan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) pada Sekolah Dasar negeri di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) pada Sekolah Dasar Negeri di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut William Dun (1999) sebagaimana dituliskan kembali oleh Anggraini (2010) mengatakan bahwa: “Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.” James E. Anderson (Islamy, 2000) mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Jadi Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.

Implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dari berbagai aktivitas yang sebelumnya telah dilakukan melalui penetapan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan. Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan tersebut (Rohaeni and Saryono 2018). Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan oleh seorang pelaksana atau implementor dengan tujuan untuk merealisasikan suatu program pemerintah sehingga menunjukkan hasil atau mencapai tujuan yang ingin dicapai. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan setelah kebijakan disahkan supaya kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Implementasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Yuliah 2020)

Implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana kebijakan pendidikan akan dianalisis menggunakan teori dari Ripley dan Franklin dengan menggunakan pendekatan *compliance* (kepatuhan) atau bagaimana seorang implementor dalam mengimplementasikan tugas yang diberikan apakah sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kepatuhan implementor tersebut mengacu kepada program yang sedang dijalankan sesuai dengan prosedur serta aturan yang ditetapkan oleh kebijakan. Proses implementasi kebijakan menggunakan aspek *compliance* dengan mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dari

kepatuhan implementor terhadap peraturan-peraturan yang ada untuk melaksanakan tugasnya maka diperlukan beberapa alternatif kebijakan sebagai proses analisis implementasi kebijakan dari segi kepatuhan implementor (Rakista, 2020; Rahmawati dkk, 2020).

Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) adalah suatu gerakan nasional yang dilaksanakan di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) negeri dan swasta yang ditetapkan pemerintah. PMTAS diselenggarakan bagi seluruh siswa SD/MI negeri dan swasta yang ditetapkan pemerintah dalam rangka perbaikan keadaan gizi dan kesehatan anak sehingga dapat mendorong minat dan kemampuan belajar siswa. Pelaksanaan PMTAS menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, orang tua dan masyarakat (Rusi *et al.* 2022). Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta PMTAS Nomor 9 Tahun 2019 PMTAS adalah kegiatan penyediaan makanan kepada peserta didik dalam bentuk kudapan atau makanan lengkap beserta kegiatan pendukung lainnya, dengan memperhatikan aspek mutu, kesehatan, keamanan, keragaman pangan dan pemberdayaan masyarakat. Sasaran PMTAS adalah Anak Sekolah pada SPAUDN, SDN dan SLBN. PMTAS bertujuan untuk: meningkatkan kecukupan asupan gizi Anak Sekolah melalui makanan tambahan; meningkatkan ketahanan fisik Anak Sekolah dalam mengikuti kegiatan belajar; meningkatkan pengetahuan dan perilaku Anak Sekolah untuk menyukai makanan lokal bergizi yang bervariasi, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS); dan meningkatkan partisipasi langsung masyarakat dan/atau untuk kepentingan langsung masyarakat dengan melibatkan Masyarakat di lingkungan sekolah. Jenis PMTAS terdiri atas penyediaan makanan tambahan kepada anak sekolah berupa jajanan/kudapan sederhana yang berbahan pangan lokal/hasil pertanian dan kegiatan pendukung lainnya (Peraturan Gubernur DKI Jakarta, 2019).

Tujuan umum program PMT-AS adalah meningkatkan ketahanan fisik anak SD/MI negeri dan swasta melalui perbaikan gizi dan belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun (Handayani, 2003). PMTAS bertujuan untuk meningkatkan kecukupan asupan gizi peserta didik melalui makanan tambahan; meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar; meningkatkan kesehatan anak khususnya dalam penanggulangan penyakit kecacangan; meningkatkan pengetahuan dan perilaku peserta didik untuk menyukai makanan lokal bergizi, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Suiraoaka & Sugiani 2017). Menurut World Health Organization "Monitoring" adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dilihat /ditemui dapat diatasi. Cassely dan Kumar (1987) menyatakan Monitoring merupakan program yang terintegrasi, bagian penting dipraktek manajemen yang baik dan arena itu merupakan bagian integral di manajemen sehari-hari. Menurut Mudjahudin dan Putra (2010) monitoring dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen proyek.

Willian N Dunn (1999) mendefinisikan Evaluasi (Penilaian) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Evaluasi adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dan menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan hasil menjadi rumusan kebijakan, dan menyajikan informasi (rekomendasi) untuk pembuatan keputusan berdasarkan pada aspek kebenaran hasil evaluasi. Menurut Suharto (2010) monitoring adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan terhadap suatu program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan terhadap suatu program yang telah selesai atau minimal telah berjalan selama tiga bulan. Nalahudin (2010) mendefinisikan monitoring adalah suatu proses untuk mengatasi permasalahan yang ditemui setelah informasi dikumpulkan dan dianalisis dari penerapan

program yang telah dilaksanakan. Sementara itu evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui efektifitas program, pencapaian program serta dampak dari program yang telah dilakukan. Hal itu diketahui dari informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya.

Perbedaan antara monitoring dan evaluasi adalah monitoring dilakukan pada saat program masih berjalan sedangkan evaluasi dapat dilakukan baik sewaktu program itu masih berjalan ataupun program itu sudah selesai. Atau dapat juga bila dilihat dari pelakunya, monitoring biasanya dilakukan oleh pihak internal sedangkan evaluasi dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh fakta atau kebenaran dari suatu program beserta dampaknya, sedangkan monitoring hanya melihat keterlaksanaan program, faktor pendukung, penghambatnya. Bila dilihat secara keseluruhan, kegiatan monitoring dan evaluasi ditujukan untuk pembinaan suatu program. Monitoring menyelesaikan permasalahan menggunakan data dasar yang tersedia, sedangkan evaluasi dapat dilakukan setelah memperoleh hasil dari monitoring yang kemudian akan di bandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Oleh sebab itu antara evaluasi dan monitoring tidak boleh dipisahkan (Widiarto, 2012).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi Implementasi Kebijakan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat. Pendekatan ini dipilih karena memberikan kesempatan untuk memahami konteks dan dinamika unik yang ada di wilayah ini, serta mendalami ke peran PMTAS dalam lingkup pendidikan. Pengukuran yang akan dipergunakan adalah Metode Rapid Assessment Procedure (RAP) atau Prosedur Penilaian Cepat adalah metode evaluasi yang dirancang untuk memperoleh informasi secara cepat dan efisien dalam konteks tertentu. Dalam konteks pendidikan di Jakarta Barat, RAP digunakan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan program PMTAS. Program ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar dalam rangka menunjang program wajib belajar, dengan mendorong minat siswa melalui peningkatan daya tahan tubuh siswa melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak sekolah. Informasi yang dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, merumuskan strategi perbaikan, dan memastikan pencapaian tujuan program.

Metode pengumpulan data kualitatif ini dirancang untuk memahami dan menggali informasi secara mendalam mengenai pandangan, persepsi, sikap, dan pengalaman subjek penelitian. Metode pengukuran yang di pergunakan adalah, pertama wawancara dengan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Sekolah, Ketua Komite, Murid dan orang tua/wali murid. Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan PMTAS di sekolah, keterlibatan kepala sekolah dalam pengawasan, dan interaksi dengan berbagai stakeholder. Kedua adalah pemeriksaan dokumen PMTAS, laporan evaluasi, kebijakan kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Ketiga adalah menganalisis data anggaran PMTAS yang telah dianggarkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat. Keempat adalah mengukur tingkat partisipasi dan keterlibatan Kepala Sekolah, Guru, Ketua Komite, Siswa, dan orang tua dalam kegiatan PMTAS. Kelima adalah evaluasi kualitas kegiatan PMTAS sudah sesuai tujuan yang diharapkan. Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk deskriptif sebagai gambaran dari pelaksanaan PMT-AS dilingkungan anak sekolah. Pengukuran data yang akan dipergunakan adalah Metode Rapid Assessment Procedure (RAP) atau Prosedur Penilaian Cepat. Metode evaluasi yang dirancang untuk

memperoleh informasi secara cepat dan efisien yang diterapkan dalam wawancara yang dilakukan untuk mendapat informasi dari para informan. Selanjutnya, uji validitas data dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Kegiatan PMTAS ini dilaksanakan di Lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat dengan sekolah yang menjadi sasaran program PMTAS berjumlah 46 Sekolah Dasar negeri. dengan jumlah siswa sebanyak 17.035 siswa yang berasal dari 4 Kecamatan yaitu Kembangan, Kebon Jeruk, Palmerah dan Grogol Petamburan di Kota Jakarta Barat.

Dalam rangkaian penelitian yang berlangsung, peneliti menerapkan kombinasi dari wawancara mendalam, survei online, dan observasi langsung. Wawancara mendalam dilakukan dengan cara semi-terstruktur, berfokus pada pihak sekolah. Teknik ini dimanfaatkan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman dan persepsi informan, terutama mengenai pelaksanaan PMTAS. Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali cerita dan konteks yang tidak tersedia melalui metode lain. Peneliti memberikan beberapa pertanyaan pada informan. Teknik selanjutnya yang digunakan oleh peneliti adalah studi dokumentasi seperti peraturan-peraturan, foto, dan dokumen sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya peneliti mengumpulkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS). Peneliti memilih untuk menggunakan teknik penentuan informan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan data dengan menentukan sampel yang sudah dipertimbangkan (Sugiyono, 2022). Dalam teknik ini, peneliti secara selektif memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau karakteristik yang relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat memberikan wawasan yang mendalam dan representatif terkait permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan terhadap 10 (sepuluh) informan yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat, 3 (tiga) orang Kepala Sekolah Dasar Negeri, 2 (dua) orang Ketua Komite Sekolah, 2 (dua) orang Siswa dan 2 (dua) orang Tua Siswa.

Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip keberagaman dan representasi yang memadai. Setelah melakukan wawancara maka peneliti akan melakukan Observasi Langsung yang dilakukan di beberapa sekolah untuk melihat secara langsung implementasi program PMTAS di lingkungan sekolah. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai informan memberikan gambaran yang luas dan mendalam tentang kegiatan PMTAS di Jakarta Barat. Temuan ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan dalam kegiatan PMTAS. Analisis data pada penelitian ini melibatkan beberapa langkah kritis dalam Pengumpulan Data, di mana semua data yang diperlukan telah dikumpulkan dengan lengkap dan akurat. Data dapat mencakup hasil wawancara, jawaban kuesioner, laporan kegiatan, observasi, dan proses evaluasi dokumen yang terkait dengan masalah penelitian dikenal dengan teknik dokumentasi. Selanjutnya Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan

informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei.

Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dokumentasi kegiatan penelitian yang melibatkan penelusuran data berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian yang bersifat teknis praktis sebagai data pendukung. Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk deskriptif sebagai gambaran dari pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah PMTAS di Lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat.

4. HASIL

Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) merupakan salah satu program untuk meningkatkan prestasi belajar dalam rangka menunjang program wajib belajar, dengan mendorong minat siswa melalui peningkatan daya tahan tubuh siswa melalui perbaikan gizi dan Kesehatan anak sekolah. Menurut Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat Bapak Purwanto menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) berpedoman kepada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Pada Satuan Pendidikan.

Dalam penelitian dilihat dari empat aspek yang terdiri dari Perencanaan yang dilakukan adalah penganggaran dana, pendataan Lokasi sasaran, menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), sosialisasi, dan Sarana dan prasarana (alat dan bahan) dan rapat koordinasi.

a. Penganggaran dana

Penganggaran dana PMT-AS dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan ke rekening masing-masing Komite Sekolah. Pencairan dana yang tepat pada waktunya merupakan salah satu faktor pendukung dalam kelancaran program PMT-AS, untuk itu Bendahara mencairkan dana sesuai dengan *time schedule* yang telah dibuat. Pejabat daerah mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan mengenai pengalokasian dana, pelaksanaan dan mekanismenya. Pihak sekolah dan masyarakat merupakan tim pelaksana. Penerima PMTAS di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat ada 46 SDN hanya sebesar 34% dari total 135 SDN yang termasuk dalam kategori sekolah-sekolah di daerah/kelurahan miskin.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang terlibat adalah tim yang bergabung dalam Tim Koordinasi PMTAS adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait, diantaranya adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Sekolah Dasar (SD), Komite, Orang tua Murid, Siswa.

c. Sosialisasi

Sosialisasi atau penyuluhan pada tahap Persiapan dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat. Kegiatan sosialisasi bertujuan agar sasaran dan pemangku kepentingan terkait meliputi Kepala Sekolah Dasar Negeri, Puskesmas, Guru-guru, dan Ketua Komite memahami tentang kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS). Narasumber dalam sosialisasi ini dari Sudin Kesehatan Jakarta Barat dengan tujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan serta latar belakang diadakannya kegiatan PMTAS kepada sasaran dan pihak terkait. Materi Sosialisasi mengenai manfaat zat gizi dan sumber zat gizi sesuai dengan jenis pangan yang tersedia.

d. Sarana dan prasarana (Alat dan Bahan)

Alat yang digunakan dalam penyelenggaraan program PMT-AS ini yaitu kebijakan atau peraturan daerah (dasar hukum, buku pedoman teknis) penyelenggaraan program PMT-AS, bahan untuk makanan kudapan, serta sarana prasarana untuk makan.

e. Rapat Koordinasi

Penyelenggaraan program PMT-AS ini diawali dengan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh SKPD terkait dan pelaksanaan di sekolah. Rapat koordinasi ini membahas tentang persiapan yang dilakukan untuk penyelenggaraan program PMT-AS, menetapkan sekolah-sekolah yang akan menjadi sasaran program PMT-AS, pencairan dana kepada masing-masing sekolah, dilanjutkan dengan pengadaan makanannya.

Berdasarkan informan Kepala Sekolah Dasar Negeri Penerima PMTAS di Jakarta Barat. Berikut menurut pendapat Kepala Sekolah mengenai pelaksanaan dalam kegiatan penyediaan makanan tambahan anak sekolah (PMTAS): Suku Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab terhadap kesuksesan pelaksanaan kegiatan PMTAS dan sekolah selaku subjek kegiatan memberikan kepercayaan kepada Komite Sekolah sebagai pelaksana program penyediaan makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) walaupun dalam pelaksanaannya masih ada kendala mengenai penyaluran dana yang sering terlambat dan ketidaksesuaian dana dengan jumlah peserta didik penerima program PMTAS.

Pelaksanaan meliputi penyaluran dana, pengolahan makanan dan pemberian kudapan/makanan.

a. Penyaluran Dana

Penyaluran dana dilakukan oleh Bendahara Suku Dinas Pendidikan kepada rekening komite masing-masing sekolah. Penyaluran dana harus memperhatikan *time schedule* agar tidak mengganggu pelaksanaan PMTAS. Jumlah dana yang diterima sekolah harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta. Jumlah dana yang diterima oleh sekolah tidak mencukupi untuk penyediaan makanan tambahan sesuai dengan jadwal pemberian makanan dan dalam jumlah yang diharapkan Akibatnya, program tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan sehingga berdampak negatif terhadap peningkatan kesehatan dan gizi anak sebagaimana diinginkan.

b. Pemberian Makanan

Program PMTAS dilaksanakan oleh komite sekolah yang terdiri dari orang tua siswa. Persiapan PMTAS dilakukan secara bersama mulai dari belanja bahan makanan, mengolah masakan hingga menyajikan makanan kepada para siswa di sekolah. Persiapan bahan makanan merupakan serangkaian kegiatan dalam mempersiapkan bahan makanan yang siap diolah (mencuci, memotong, menyangi, meracik dan sebagainya) sesuai dengan menu. Pengolahan bahan makanan merupakan suatu kegiatan mengubah (memasak) bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap dimakan, berkualitas, dan aman untuk dikonsumsi. Pendistribusian makanan adalah serangkaian proses kegiatan penyampaian makanan ke siswa. Pembagian makanan dilakukan pagi hari pada istirahat jam pertama. Makanan diberikan ke siswa di dalam ruang kelas atau di lapangan sekolah.

Berdasarkan informan Kepala Sekolah Dasar Negeri Penerima PMTAS di Jakarta Barat. Berikut menurut pendapat Kepala Sekolah mengenai pengawasan dalam kegiatan penyediaan makanan tambahan anak sekolah (PMTAS): Monitoring dan evaluasi berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan memberikan masukan-masukan yang dapat diterapkan oleh Tim Pelaksana PMTAS walaupun masih ada kendala keterbukaan informasi dari pihak pelaksana yaitu komite sekolah.

Evaluasi dan pemantauan dilakukan oleh tim secara berjenjang. Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas PMTAS sekolah, Pengawasan dari Puskesmas untuk memastikan apakah makanan layak konsumsi atau berbahaya jika dikonsumsi dengan cara menyerahkan contoh makanan untuk diperiksa. Petugas puskesmas bertugas mengawasi makanan PMT-AS seperti cara pengolahan, nilai gizi dan kalori serta higienitas makanan. Namun, dalam pelaksanaannya pengawasan oleh petugas puskesmas masih kurang. Petugas jarang mengunjungi pemasak maupun sekolah. serta pengawasan dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan walaupun petugas monev hadir ke sekolah setelah pembagian makanan itu selesai dibagikan ke siswa. Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan Instrumen Monitoring yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan informan Kepala Sekolah Dasar Negeri Penerima PMTAS di Jakarta Barat. Berikut menurut pendapat Ketua Komite mengenai pelaporan dalam kegiatan penyediaan makanan tambahan anak sekolah (PMTAS): Di awal pelaporan PMTAS terdapat kendala yaitu tidak ada nya bentuk format penyusunan dokumen jadi dokumen pelaporan berbeda-beda dan perlu ber kali-kali revisi hingga menjadi SPJ yang bisa diterima oleh Sudin Pendidikan, namun di tahun 2023 sudah terdapat format yang sama dalam pelaporan jadi lebih memudahkan dalam menyusun laporan. Laporan PMTAS terdiri dari Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan pengiriman menu PMTAS, berita acara administrasi, tanda terima peserta didik, surat perjanjian sewa sarana dan prasarana, bukti-bukti pembayaran upah, belanja dan sewa yang dikeluarkan selama pelaksanaan PMTAS, foto-foto dokumentasi pengerjaan, pelaksanaan dan pendistribusian PMTAS

Laporan dibuat untuk menggambarkan pelaksanaan program PMT-AS yang sudah dijalankan. Dalam Pelaksanaan PMTAS laporan di buat empat tahapan sesuai dengan juknis PMTAS dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ketua komite menyusun laporan pelaksanaan PMTAS berdasarkan perjanjian kontrak. Surat pertanggungjawaban terdiri dari

beberapa dokumen seperti: perjanjian swakelola yang sudah ditandatangani kedua belah pihak, SK ketua komite sekolah tentang pembentukan tim swakelola, Nota kesepahaman, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Pekerjaan, Berita acara penyerahan pekerjaan, kwitansi yang dibubuhi materai, surat pernyataan kesiapan melaksanakan pekerjaan, berita acara pembayaran, Rencana penggunaan dana, jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan foto dokumentasi. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dibuat oleh komite, disetujui oleh kepala sekolah dan diperiksa oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat.

Persepsi mengenai pelaksanaan dan mengenai manfaat PMT-AS

Responden seluruhnya menyatakan pelaksanaan PMT-AS berjalan dengan baik dan merasakan manfaat atas program PMTAS yang telah diselenggarakan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat.

Tabel. 1 Persepsi mengenai pelaksanaan PMTAS

No.	Responden	Pelaksanaan PMTAS	
		Baik	Tidak Baik
1	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat	100%	0%
2	Kepala Sekolah	100%	0%
3	Ketua Komite Sekolah	100%	0%
4	Orang Tua Murid	100%	0%
5	Murid	100%	0%

Tabel. 2 Persepsi mengenai Manfaat PMTAS

No.	Responden	Manfaat PMTAS	
		Ada Manfaat	Tidak Manfaat
1	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat	100%	0%
2	Kepala Sekolah	100%	0%
3	Ketua Komite Sekolah	100%	0%
4	Orang Tua Murid	100%	0%
5	Murid	100%	0%

PEMBAHASAN

Responden pada umumnya memberikan sikap yang positif terhadap pelaksanaan PMT-AS. PMT-AS saat ini mempunyai kerangka arus dari bawah (bottom up) sejak otonomi daerah diberlakukan. Secara konsep PMT-AS sangat relevan dengan keadaan saat ini karena keadaan ekonomi Indonesia yang masih belum stabil sehingga berdampak pada keluarga yang mayoritas sangat sulit untuk menyediakan makanan yang bergizi. Otonomi daerah memerlukan

kerjasama dan harmonisasi hubungan antar daerah akan memperluas jangkauan pemanfaatan sumber daya dan berbagai hasil suatu daerah (Rohima, 2016). Keberhasilan mengatasi masalah gizi merupakan tanggung jawab bersama. Berhasil atau gagalnya program juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadapnya. Apabila sikap ini menguntungkan maka masyarakat akan bertindak sesuai rencana program. Perencanaan pembangunan daerah juga dikaitkan dengan keputusan politik dari pemerintah, maka ada hal tertentu yang harus dilaksanakan tanpa harus mengenyampingkan kepentingan masyarakat, namun untuk jangka panjang kebijakan yang diambil harus sejalan dengan kesepakatan yang telah digariskan.

Adapun kendala yang terjadi dalam kegiatan PMTAS pada penelitian ini yang dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan dari kegiatan. Manfaat PMT-AS memang dirasakan pengaruhnya tidak terlalu besar tapi tetap berdampak positif pada murid, sekolah, dan lingkungan. Ketahanan fisik murid yang lebih baik akan memberikan peluang menerima pelajaran lebih baik. Pengetahuan gizi tidak meningkat tetapi anak dibiasakan memilih makanan yang lebih baik saat jajan. Persepsi pelaksana program yaitu kepala sekolah, guru dan tim masak terkait Program gizi anak sekolah diantaranya merupakan contoh yang baik untuk orangtua dalam menyajikan makanan anak yang sehat dan bergizi, mengurangi anak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, anak-anak merasa senang karena mendapatkan makanan yang bergizi, dan meningkatkan pendidikan karakter melalui antri, berdo'a, dan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan.

Dalam penetapan sekolah sasaran untuk PMT-AS ini berjumlah 46 sekolah dari 135 Sekolah Dasar negeri. Penetapan sekolah berdasarkan prioritas dengan melihat status ekonomi peserta didik yang kurang mampu. Jumlah peserta didik penerima PMTAS ini tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan karena saat penganggaran Suku Dinas Pendidikan menarik data jumlah peserta didik dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Mutasi siswa dan penambahan kuota PPDB menjadi penyebab sekolah menerima dana lebih sedikit dari yang seharusnya. Jumlah dana yang diterima oleh sekolah tidak mencukupi untuk penyediaan makanan tambahan sesuai dengan jadwal pemberian makanan dan dalam jumlah yang diharapkan karena sasaran ditetapkan sebelum tahun ajaran dimulai dan jumlah tepat murid yang mendaftar sekolah belum diketahui. Pelaksanaan PMT-AS yang paling sering dikeluhkan responden adalah pencairan dana yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan jumlah murid. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi tim pelaksana pada masing-masing tingkatan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang lebih matang dalam mengantisipasi keterlambatan pencairan dana tersebut. Sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan program PMTAS ini sudah siap menjalankan kegiatan. Akan tetapi untuk pihak pelaksana yaitu ketua komite mengharapkan pelatihan atau sosialisasi dilakukan secara berkesinambungan bukan hanya satu kali saja sebelum pelaksanaan PMTAS. Tidak memadainya program pelatihan menyebabkan ketidakberhasilan pelaksanaan aspek-aspek penting dalam program PMTAS seperti kurangnya pemahaman tentang nilai gizi dari makanan tambahan.

Pelaksanaan PMTAS yang paling sering dikeluhkan responden adalah pencairan dana yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan jumlah murid. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi tim pelaksana pada masing-masing tingkatan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang lebih matang dalam mengantisipasi keterlambatan pencairan dana tersebut. Dana sangat penting untuk kelangsungan program PMTAS untuk pengadaan peralatan dan bahan makanan yang dibutuhkan dalam menunjang dan mensukseskan program PMTAS.

Alokasi dana yang ditetapkan masih belum mencukupi untuk pelaksanaan PMTAS, karena alokasi dana ini untuk membeli perlengkapan masak, alat-alat dan gaji pemasak.

Pemberian PMTAS dilakukan pada jam istirahat pertama pada pagi hari dan siang hari untuk sekolah petang. Makanan terkadang disiapkan dan dibagi terlalu awal oleh guru sehingga makanan dingin disajikan, sehingga mempengaruhi kualitas makanan dan penerimaannya oleh anak-anak. Makanan harus dimakan peserta didik di sekolah, akan tetapi masih ada peserta didik yang membawa pulang makanan karena tidak menyukai menu makanan tersebut. Setelah diperiksa oleh orang tua ternyata makanan tersebut basi karena sudah lebih dari 6 jam setelah proses pengolahan bahan makanan. Dalam pelaksanaan penyediaan makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) dibentuk tim pelaksana yang bertanggung jawab terhadap program, kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan pihak di luar sekolah menjadi pendukung dalam program gizi anak sekolah ini, diantaranya partisipasi masyarakat dalam membantu menyediakan peralatan masak, tim masak sebagian besar merupakan wali murid yang membantu secara sukarela dalam program, dan orangtua siswa yang berpersepsi positif tentang program.

Setelah terlaksananya PMT-AS maka dilakukan monitoring evaluasi dan pengawasan dan banyak ditemukan pelaksanaan PMT-AS tidak sesuai dengan pedoman PMT-AS yang sudah ditetapkan. Seperti masih kurangnya pemantauan dan pengawasan dari pihak Puskesmas terkait dalam PMT-AS ini, seharusnya pemegang program gizi bekerjasama dengan pihak guru dan tim pemasak supaya bisa menghasilkan masakan yang bergizi. Pengawasan penyediaan makanan tambahan juga dilakukan oleh tenaga pelaksana gizi puskesmas. Petugas puskesmas bertugas mengawasi makanan PMT-AS seperti cara pengolahan, nilai gizi dan kalori serta higienitas makanan. Namun, dalam pelaksanaannya pengawasan oleh petugas puskesmas masih kurang. Petugas jarang mengunjungi pemasak maupun sekolah.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Suku Pendidikan Jakarta Barat dengan dibantu oleh guru kelas dan Kepala Sekolah pada saat makan dibagikan ke siswa. Jika model ini dipergunakan sebagai program maka tenaga monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh guru, kepala sekolah, puskesmas yang berkaitan dengan menu, pengolahan bahan pangan, tingkat kesukaan & daya terima makanan, serta dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat. Monitoring dilakukan untuk melihat dan menilai kualitas dari makanan, cita rasa, keamanan dan kemasan dari makanan yang diberikan. Pelaksanaan kegiatan di evaluasi sebagai bahan penilaian dan pengambilan keputusan program. Laporan dicatat untuk menggambarkan pelaksanaan program PMTAS yang sudah dijalankan. Evaluasi untuk melihat apakah ada kendala atau tidak agar pada pelaksanaan bulan berikutnya dapat berjalan lancar. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi lebih ditingkatkan untuk menunjukkan keberhasilan program. Pelaksanaan PMT-AS pada pengendalian dan evaluasi tidak optimal sehingga akan kesulitan dalam melihat keberhasilan program tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya evaluasi program untuk melihat perkembangan yang terjadi setelah pemberian PMT-AS.

Suku Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Pengguna Anggaran PMTAS bertanggung jawab terhadap keuangan dan administrasinya. Masih kurangnya pengetahuan cara membuat Surat Petanggungjawaban (SPJ) dan administrasi keuangan lainnya yang dirasakan oleh Tim Pelaksana PMTAS sehingga perlu dilakukan pendampingan dan pelatihan mendalam dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh

ketua komite sekolah. Waktu pelaporan SPJ tidak sesuai time schedule yang telah ditetapkan yaitu untuk pelaporan tahap pertama sebelum dana tahap ke dua dicairkan, begitu seterusnya. Sekolah Dasar penerima dana PMTAS wajib membuat laporan penerimaan dana tahap I sampai dengan tahap IV, laporan masing-masing tahap dilakukan setelah dana masuk ke rekening sekolah dan setelah pelaksanaan PMTAS dalam setia tahap. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan waktu pelaporan adalah sebanyak 1 bulan sekali yang telah ditentukan waktunya oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat.

Ketua Komite Sekolah memiliki tugas dan kewajiban dalam menyampaikan laporan yang dilaporkan ketika suatu program sudah dilakukan. Tujuan dari pelaporan ini yaitu guna untuk mencairkan dana PMTAS pada tahap berikutnya. Ketua Komite dibantu oleh pihak sekolah membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan dana yang dilaporkan kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat. Dalam melakukan pelaporan realisasi dana Komite dituntut untuk melaporkan secara tepat waktu, karena apabila terlambat maka Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat berhak menunda pencairan dana desa tersebut. Adapun laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi dalam pelaksanaan dana yang disampaikan pada setiap akhir bulan yang ditetapkan dalam Juknis pelaksanaan PMTAS pada satuan pendidikan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana tersebut terdiri dari perjanjian swakelola yang sudah ditandatangani kedua belah pihak, SK ketua komite sekolah tentang pembentukan tim swakelola, Nota kesepahaman, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Pekerjaan, Berita acara penyerahan pekerjaan, kwitansi yang dibubuhi materai, surat pernyataan kesiapan melaksanakan pekerjaan, berita acara pembayaran, Rencana penggunaan dana, jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan foto dokumentasi. Setiap program yang terlaksana harus memiliki rekam jejak yang jelas. Laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan kegiatan PMTAS berdasarkan hasil telaah data kualitatif dapat disimpulkan bahwa pelaporan dilaksanakan dengan baik. Hal ini mengisyaratkan bahwa empat dari kriteria keberhasilan program PMTAS sudah berhasil dilaksanakan di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2022) bahwa program penyediaan makanan tambahan anak sekolah sudah berjalan baik walaupun masih ada kendala dalam pelaksanaannya dengan menunjukkan pencapaian meningkatnya ketahanan anak sekolah dan tidak mengalami gizi buruk.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa PMTAS sudah dilaksanakan sesuai regulasi yang ada, akan tetapi manfaat PMTAS memang dirasakan pengaruhnya tidak terlalu besar tapi tetap berdampak positif pada murid, sekolah, dan lingkungan. program PMT-AS tercermin dari terlaksananya secara maksimal fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Implementasi dari keempat fungsi manajemen tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan efektivitas manajemen program PMT-AS. Upaya peningkatan kualitas dari masing-masing fungsi manajemen tersebut sangat diperlukan dalam rangka untuk mencapai tujuan program PMT-AS, yaitu meningkatkan ketahanan fisik siswa SD usia Sekolah Dasar, melalui perbaikan gizi dan kesehatan sehingga mendorong minat dan kemampuan belajar siswa untuk meningkatkan prestasi dan kemampuan belajar dalam rangka menunjang

tercapainya program wajib belajar sembilan tahun. Ketahanan fisik murid yang lebih baik akan memberikan peluang menerima pelajaran lebih baik. Pengetahuan gizi tidak meningkat tetapi anak dibiasakan memilih makanan yang lebih baik saat jajan. Hasil telaah tersebut masih ada kendala terutama dikarenakan oleh keterlambatan diterimanya dana di tempat sasaran, seperti sekolah, dan bahwa dalam banyak kasus, jumlah dana yang diterima oleh sekolah tidak cukup untuk menyediakan makanan tambahan yang sesuai dengan jadwal pemberian makanan tambahan serta dalam jumlah yang diharapkan karena sasaran telah ditetapkan sebelum mulai tahun ajaran dan sebelum diketahuinya jumlah tepat murid yang mendaftar sekolah. Penilaian yang dipergunakan dalam mengevaluasi dampak pelaksanaan Program PMTAS, dengan menggunakan indikator keberhasilan yang bersifat terapan atau aplikasi. Dimana penilaian objek dilakukan secara random, dengan indikator penilaian adalah murid, guru, wali murid dan masyarakat disekitarnya. Pelaksanaan PMT-AS pada pengendalian dan evaluasi tidak optimal sehingga akan kesulitan dalam melihat keberhasilan program tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran pentingnya evaluasi program untuk melihat perkembangan yang terjadi setelah pemberian PMT-AS.

Terlepas masih ada beberapa hal kekurangan sifatnya masih minor dan bisa diperbaiki melalui komunikasi sehingga permasalahan bisa diselesaikan secara akurat dan cepat. Analisis kualitatif implementasi kebijakan PMTAS pada Sekolah Dasar Negeri di wilayah Jakarta Barat II memberikan wawasan mendalam tentang manfaat dan tantangan dalam pendidikan. Peneliti merasa terinspirasi melihat bagaimana pemerintah daerah sangat memperhatikan gizi anak sekolah dan untuk mendukung kemajuan pendidikan. Namun, merasa prihatin masih ada kendala yang menunjukkan kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam manajemen sekolah. Semoga temuan ini menjadi landasan untuk perbaikan dan inovasi dalam pendidikan, demi masa depan yang lebih baik bagi siswa dan komunitas sekolah.

6. REFERENSI

- Berly Nisa Srimayarti & Ririn Afrima Yenni. (2021). Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS). ARKESMAS, Volume 6, Nomor 2
- Chandradewi, I Nyoman Adiyasa. (2021). Peningkatan Status Gizi Anak Sekolah Melalui Pendampingan PMT-AS Berbasis Pangan Lokal. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sasambo, Volume 3
- Cica Yulia. (2017). Revitalisasi pemberian makanan tambahan anak sekolah berbasis kearifan lokal diperlukan untuk mengatasi masalah gizi yang terjadi pada anak sekolah. Media Pendidikan, Gizi dan Kuliner. Vol. 6, No. 1
- Eni Rohaeni dan Oyon Saryono. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. Volume 2 Number 1 P ISSN : 2620-9616
- Fatemeh Khorramrouz. (2022). *Validity of a modified food and nutrition literacy questionnaire in primary school children in Iran. British Journal of Nutrition*, 127, 1588–1597
- Firman, F., Rahmawati, R., & Mandela, M. F. (2020). Kebijakan Dana Desa: Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 5(2), 181-192.

- Frintin Anggraini. (2010). Analisis implementasi Kebijakan Publik. Depok. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
<http://jkip.poltekkes-mataram.ac.id/index.php/PKS/article/view/777/297>
- I Putu Suiraoaka & PP. Sri Sugiani. (2017). Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Terhadap Status Gizi Kadar HB dan Prestasi Belajar Anak SD di Kota Denpasar. Jurnal Sangkareang Mataram. ISSN No. 2355-9292. [http://www.untb.ac.id/Juni-2017/Ira](http://www.untb.ac.id/Juni-2017/Ira%20Endah%20Rohima)
- Ira Endah Rohima. (2016). Kajian Program Makanan Tambahan Untuk Anak Sekolah (PMTAS) di Bandung. Infomatek Volume 18 Nomor 1
- Isti Handayani. (2003). Pengembangan Produk Makanan Tradisional untuk Mendukung Program Makanan Tambahan Anak Sekolah. Jurnal Pembangunan Pedesaan Vol. III No. 2
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0028 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri. 2022
- Luciana Jeremias. (2020) *Trends in food consumption of schoolchildren from 2nd to 5th grade: a panel data analysis*. <http://dx.doi.org/10.1590/1678-9865202033e190164>
- Maria Helena D.Nita. (2021). Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Berbasis Pangan Lokal Dalam Meningkatkan Status Gizi Siswa Sekolah Dasar Negeri Batuinan Semau Kabupaten Kupang. Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Kepulauan Lahan Kering E-ISSN : 2746-2234
- Muhammad Bintang Darmawan. (2020). Evaluasi Program Suplemen Anak Sekolah. Jurnal Kepemimpinan Pendidikan. Vol. 3(1) 374-380
- Palanisamy Navaneethan & Thiagarajan Kalaivan. (2011). *Nutritional status of children in rural India: a case study from Tamil Nadu, first in the world to initiate the Mid-Day Meal scheme*. Vol.3, No.10, 647-655
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta NOMOR 9 TAHUN 2019 Tentang Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Pada Satuan Pendidikan. 2019
- Purbarini. (2019). Implementasi Kebijakan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah di TK Islam Plus Mutiara Banguntapan Bantul Yogyakarta
- Putri Mutiara Rakista. (2020). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar
- Raisita Endah Dwi Noviyani. (2012). Efek Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar di SDN Banyuanyar III Kota Surakarta.
- Rahmawati, R., & Firman, F. (2017). Analisis Impelementasi Kebijakan Aplikasi Qlue Di Wilayah Jakarta Utara. *ARISTO*, 5(2), 386-404.
- Rusi Novi Safitri & Desy Ayu Fitriana. (2022). Peran Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Terhadap Status Gizi Anak. <http://pps.unnes.ac.id/prodi/prosiding-pascasarjana-unnes/>
- Siska Pratiwi. (2022). Evaluasi Akhir dalam Implementasi Program Gizi Anak Sekolah (Progas) Tahun 2018 di Kabupaten Kulon Progo. *Medihealth: Jurnal Ilmu Kesehatan dan Sains* e-issn:2729-7560 Volume 2 Nomor 2 Halaman 35-50
- Sugiyono. (2022a). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (29th ed.).Alfabeta, Bandung.

Yuliah Elih. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* Volume 30 Nomor 2 Tahun 2020